

Hindari Pungli, Wali Kota Medan Luncurkan Uji KIR Nontunai

MEDAN (IM) - Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution meluncurkan pembayaran biaya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR nontunai melalui layanan E-Money, QRIS dan Qren demi menghindari pungutan liar (pungli).

“Melalui pembayaran nontunai yang berkolaborasi dengan Bank Sumut ini dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” kata Bobby di Kantor Unit Pelayanan Terpadu PKB Amplas, Rabu.

Bobby mengatakan Pemkot Medan selalu berkolaborasi dengan semua pihak dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan PAD, salah satunya pembayaran tunai secara perlahan mulai dikurangi.

Sebab, lanjutnya, pembayaran tunai sangat erat kaitannya dengan kecenderungan tidak transparan den-

gan yang dilakukan beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Medan. Menurut menantu Presiden Jokowi ini, sistem pembayaran tunai secara perlahan sudah mulai ditinggalkan.

“Apalagi saat ini kita masuk di era 4.0, dan Pemkot Medan harus siap menyambut era itu, salah satunya dengan pembayaran nontunai,” terang Bobby.

Pemkot Medan, jelas dia, juga meminta bantuan Bank Sumut untuk merealisasikan pembayaran parkir nontunai, sebab parkir merupakan penyumbang PAD terbesar di Kota Medan.

“Setelah pembayaran uji KIR hari ini, dua pekan lagi kita targetkan pembayaran parkir nontunai. Lokasi pertama menjadi percontohan di kawasan Kesawan. Jika berhasil, maka PAD Kota Medan akan meningkat,” ujar dia. ● **pra**

Bogor Mulai Vaksinasi Lansia

BOGOR (IM) - Kota Bogor mulai melakukan vaksinasi Covid-19 dengan sasaran lanjut usia (lansia), Rabu (17/3).

Vaksinasi dengan layanan tanpa turun dari kendaraan (drive thru) dilakukan di seputar jalan di GOR Panjajaran Kota Bogor. Tiap orang yang akan divaksin, dengan menggunakan kendaraan, masuk melalui pintu di Jalan Ahmad Yani dan keluar di Jalan Pemuda.

Pantauan di lapangan, tiap kendaraan penerima vaksin akan melewati tiga meja penyaringan.

Sejak awal datang, tiap kendaraan penerima vaksin akan diberikan dua lembar isian. Berisi data diri hingga riwayat penerima vaksin. Selanjutnya, lembar isian itu akan diberikan di meja penyaringan kedua. Di sini lah, tiap penerima vaksin akan dilakukan wawancara terkait kondisi kesehatan penerima vaksin.

“Ada beberapa indikator yang ditentukan bagi tiap

penerima vaksin, harus di bawah poin dua, bila di atas nilai dua berarti tidak lolos skrining. Salah satu indikatornya, tekanan darah,” kata vaksinator Tiur Siregar.

Kata dia, perjalanan atau proses vaksinasi hanya membutuhkan waktu 15 menit dengan rata-rata setiap meja yang rata-rata setiap meja yang akan divaksin, dengan menggunakan kendaraan, masuk melalui pintu di Jalan Ahmad Yani dan keluar di Jalan Pemuda.

“Setelah vaksinasi, penerima vaksin diminta melakukan observasi sekitar 30 menit. Bila tidak ada efek berlanjut, dipersilakan pulang, jika ada keluhan berat nantinya akan dirujuk ke rumah sakit,” tambah Tiur.

Salah satu penerima vaksin, Indra (62), warga Yasmin, Bogor Barat menuturkan, layanan drive thru ini sangat membantu karena bagi orang lanjut usia sudah sulit bergerak banyak.

“Lansia ini kan, mah ngapa-ngapain malas. Pengetahuan kesehatan wawancara terkait kondisi kesehatan penerima vaksin.”

“Ada beberapa indikator yang ditentukan bagi tiap



IDN/ANTARA

UPAYA PELESTARIAN DOMBA GARUT

Peternak memeriksa domba Garut di Balai Pengembangan Pembibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (17/3). Balai pembibitan yang didirikan pemerintah Jawa Barat Tahun 1975 bertujuan untuk mempertahankan genetika serta peningkatan populasi domba yang hingga Maret 2021 sebanyak 1.700 ekor domba Garut.

Ade Yasin Berkomitmen untuk Berantas Korupsi

BOGOR (IM) - Bupati Bogor, Ade Yasin menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penandatanganan dilakukan bersama gubernur dan 26 bupati/walikota se-Jawa Barat.

Penandatanganan dilakukan dalam Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3).

Ade Yasin menguatkan kembali komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Mengawali tahun 2021, strategi pemberantasan korupsi perlu disusun kembali. KPK bukan hanya menindak tapi juga mengedukasi dan mencegah korupsi lewat sistem pemerintahan. Edukasi dan pencegahan harus terus dibangun di Kabupaten Bogor.

“Kabupaten Bogor terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan, sehingga pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal. Harapannya, masyarakat percaya dan optimistis bahwa sistem pemberantasan korupsi di Kabupaten Bogor semakin baik dari waktu ke waktu,”

terang Ade.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan bahwa pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 27 daerah lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga kualitas pelayanan publik bisa jauh lebih maksimal.

Sementara itu, Ketua KPK, Firdi Bahuri mengingatkan pemberantasan korupsi tanggung jawab bersama, aparat pemerintah daerah, pusat, hingga masyarakat. “Semua harus andil dalam rangka pemberantasan korupsi,” katanya.

Dalam pemberantasan korupsi, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan sarannya adalah jejaring pendidikan, calon dan aparaturnya, para politisi, penyelenggara negara, serta para pengusaha.

“Tujuan akhir pendidikan masyarakat ini kita ingin supaya orang tidak mau melakukan korupsi karena sadar akan bahaya dan sebab korupsi. Korupsi adalah kejahatan, bukan hanya melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, tapi jauh dari itu korupsi merampas hak kita semua,” imbuhnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

ANTISIPASI BANJIR DI KOTA BANDUNG

Pekerja mengoperasikan alat berat untuk mengeruk sedimentasi di Kolam Retensi Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/3). Pengerukan sedimentasi di Kolam Retensi Gedebage tersebut dilakukan sebagai salah satu antisipasi banjir yang kerap kali terjadi di kawasan tersebut saat hujan mengguyur Kota Bandung.

Demi Jalan Puncak II, Ade Yasin Lobi Komisi V dan KemenPU-PR

Bersama Bupati Cianjur, kami akan menjelaskan pentingnya pembangunan Jalan Puncak II, karena ini bukan kepentingan dua daerah tetapi regional Jawa Barat dan juga kepentingan nasional, kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

CIBINONG (IM) - Berlarut-larutnya pelaksanaan pembangunan Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II, Pemkab Bogor pun melobi Komisi V DPR plus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR). Mereka akan meninjau lokasi Jalan Puncak II, sedangkan Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur dengan berharap dengan kedatangan Komisi V DPR RI dan KemenPU-PR maka terjadi percepatan pembangunan Jalan Puncak II.

“Dalam peninjauan 13 anggota Komisi V DPR RI dan

pejabat KemenPU-PR tidak hanya saya dan jajaran saja yang hadir tetapi juga Bupati Cianjur,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin kepada wartawan, Rabu, (17/3).

Ibu dua orang anak ini menambahkan bersama Bupati Cianjur Maman Hermansyah, dirinya akan menyakinkan Komisi V DPR RI dan KemenPU-PR untuk segera membangun Jalan Puncak II.

“Bersama Bupati Cianjur kami akan menjelaskan pentingnya pembangunan Jalan Puncak II, ini bukan kepentingan dua daerah tetapi regional Jawa Barat dan juga kepenting-

gan nasional,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi V plus badan anggaran (Banggar) DPR RI, Mulyadi menuturkan dengan meninjau lokasi Jalan Puncak II, KemenPU-PR atau pemerintah pusat mengetahui kondisi di lapangan.

“Kalau teriak-teriak di Ruang Rapat di Gedung DPR RI saat Komisi V rapat dengan KemenPU-PR sudah sering saya lakukan, dengan meninjau lokasi pembangunan Jalan Puncak II, KemenPU-PR atau pemerintah pusat mengetahui kondisi di lapangan,” tutur Mulyadi.

Wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini menjelaskan ada tiga tujuan pembangunan Jalan Puncak II hingga masyarakat Kabupaten Bogor ngotot meminta pembangunan Jalan Puncak II.

“Ada tiga tujuan pembangunan Jalan Puncak II yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak, Keca-

matan Megamendung dan Kecamatan Cisarua, mengenalkan objek wisata baru dan mening-

katkan pendapatan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bogor,” jelasnya. ● **gio**

Seluruh Kontak Erat Kasus Korona B117 Warga Bogor Negatif

BOGOR (IM) - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan seorang pekerja migran asal Kota Bogor, Jawa Barat yang terinfeksi mutasi virus corona B117 telah sembuh.

Nadia pun memastikan 16 kontak erat warga tersebut juga negatif Covid-19. Seluruh kontak erat menjalani pemeriksaan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) pada Selasa (16/3) kemarin.

“Warga Bogor dengan B117 sudah dalam kondisi sehat saat ini, dan hasil pemeriksaan kontak semua negatif,” kata Nadia dalam acara daring, Rabu (17/3).

Dihubungi terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim juga mengaku telah menerima laporan bahwa seluruh kontak erat dari warga berjenis kelamin pria itu dinyatakan negatif virus corona. “Informasinya demikian ya, Alhamdulillah,” kata Dedie

melalui pesan singkat, Rabu (17/3).

Dedie menjelaskan warga positif virus corona B117 itu berstatus orang tanpa gejala (OTG). Ia melakukan tes swab di Bandara Soekarno-Hatta pada 1 Februari lalu.

Ia langsung menjalani isolasi di salah satu hotel di DKI Jakarta selama 12 hari.

Pada pertengahan Februari, warga tersebut langsung pulang ke Kota Bogor usai dinyatakan negatif Covid-19. Saat ini, warga tersebut sudah kembali bekerja di Afrika.

Pemerintah kota Bogor baru mendapat informasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemkes pada Selasa (15/3) lalu.

Kemkes menginformasikan bahwa berdasarkan hasil teknik pencarian strain virus dengan metode Whole Genome Sequence (WGS) secara acak, warga tersebut terpapar Covid-19 dengan varian B117. ● **pp**

Ridwan Kamil: Jabar Surplus, Pusat Diminta Batakan Impor 1 Juta Ton Beras

BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda atau membatalkan impor 1 juta ton beras. Mengingat kondisi surplus beras di Jabar yang disusul panen raya pada Maret dan April mendatang.

Kami ini surplus beras di Jawa barat, dan kedua, sebentar lagi mau panen raya kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting.

Petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang, maka kami memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan, sehubungan dengan surplus panen kita, ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3).

Menurutnya, hingga April 2021 Jabar memiliki surplus beras hingga 322 ribu ton. Ia pun telah berkomunikasi melalui vidcon kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Jawa Barat terkait hal ini. Sejumlah perwakilan Gapoktan curhat mengenai rencana impor tersebut.

“Tadi dari Cirebon curhat, biasa bulog beli 120 ribu ton sampai 13 ribu ton, sekarang menurunkan menjadi 21 ribu ton. Masa sudah beras banyak, impor pula kan begitu. Kalau posisinya krisis beras, saya kira masuk akal ya, tapi ini surplus di Jabar,” ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Jangan sampai, ujar Kang Emil, impor beras malah mengancam kesejahteraan petani yang tengah diangkat derajat dan martabatnya melalui berbagai program yang dirancang Pemprov Jabar.

“Maka kami mengusulkan ke pemerintah, agar menunda

beras impor, maksimalisasi saja produksi Jabar yang melimpah,” katanya.

Pokoknya ini sila kelima, Keadilan Sosial, kesejahteraan petani nomor satu tanpa mereka (petani) kita tidak jadi apa-apa.

Makanya manajemen timing ini menjadi penting, salah satu hal itu tadi ada hitungan, jangan sampai sekarang panen raya ini nanti harga kebanting, kan kasihan ini susah menyejahterakan petani, kecuali kita ada keberpihakan, ujar dia.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dadan Hidayat menambahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun di Jabar sebanyak 128,4 kilogram.

“Jumlah penduduk Jawa Barat sekarang kan ada di Kisaran 49.350.000 orang, kalau saya itung-itungan kasar itu memerlukan beras itu kurang lebih 6.000.400 ton beras untuk dalam setiap tahun, tadi yang disampaikan oleh pak gubernur adalah itung-itungan kami dari kacamata panen bulan Januari dan Februari, Maret-April, itu kan ada potensi panen,” kata Dadan di Gedung Sate.

“Yang potensi panen yang menetapkan bukan kami, Badan Pusat Statistik. kita menghitung kelihatannya. Sudah saya konfirmasi soal beras 322 ribu ton beras, sampai dengan bulan April. dan juga April ini memang lagi panen raya. jadi masalah yang tadi kita katakan, itu kan faktual. aspirasi temen-temen petani bahwa sekarang sedang panen raya, kok tiba-tiba kan ada kebijakan impor,” impornya kan masih wacana,” ujar Dadan. ● **pur**

Pemkot Bogor Alokasikan Rp 32 Miliar untuk Masjid Agung

BOGOR (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera melanjutkan pengerjaan revitalisasi Masjid Agung Kota Bogor yang terletak di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Untuk melanjutkan pembangunan tersebut, Pemkot Bogor mengalokasikan dana sebesar Rp 32 miliar.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, proyek masjid yang dibongkar pada 2016 itu ditargetkan masuk tender pada awal April mendatang. Sehingga, ditargetkan juga pada akhir Mei pemenang tender sudah didapatkan.

“Proses (tender) kurang lebih satu bulan. Jadi Mei ini Insya Allah kita sudah punya pemenang lelang. Anggaran yang disiapkan untuk tahap ini sebesar Rp32 miliar,” kata Dedie, Rabu (17/3).

Dedie menjelaskan, dana sebesar Rp 32 miliar itu, bukan untuk membangun keseluruhan masjid hingga selesai. Namun, akan digunakan untuk membangun struktur bangunan dan struktur atap.

Sementara, untuk membangun masjid secara keseluruhan hingga selesai, Pemkot Bogor masih membutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 50 miliar. Di mana, kata Dedie, dana tersebut akan digunakan untuk desain interior, dan bagian lainnya.

“Jadi bukan keseluruhan (selesai di tahun ini). Selanjutnya kita masih membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar lagi untuk penyelesaian, yang meliputi interior dan lainnya,” tegasnya.

Proyek pembangunan masjid yang terintegrasi dengan Alun-alun, dan berhimpitan dengan Pasar Kebon Kembang Blok F ini, ditargetkan akan rampung pada tahun anggaran 2022. Dedie mengatakan, sumber anggaran revitalisasi Masjid Agung ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sendiri.

“Ya tahun 2022 akhir. Secara total. Kita anggarkan pada tahun itu sehingga bisa finish sampai akhir 2022. Dari APBD semua,” ucapnya.

Menurut Dedie, pembangunan Masjid Agung ini juga harus memperhatikan aspek keindahan. Bisa melalui desain interior, termasuk ornamen-ornamen lain yang akan ditambahkan ke depannya.

Sehingga, lanjutnya, selain bisa berfungsi bagi warga sekitar, Masjid Agung juga memiliki keindahan yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Namanya bangunan masjid harus indah. Dari ornamen-ornamen lain mungkin. Yang penting ini masjid harus jadi,



IDN/ANTARA

UJI COBA UJIAN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN Siswa mengikuti Uji Coba (Try Out) Ujian Sekolah kelas 9 di SMP N 5 Ungaran, Kab Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/3). Seluruh SMP Negeri di Kab Semarang secara serentak melaksanakan uji coba tersebut guna menghadapi Ujian Sekolah pada April mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat serta membatasi kapasitas 50 persen jumlah siswa dengan pelaksanaan bergilir guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.